

Ruang Terang Keterwakilan Perempuan

Putusan MK 128/2026 mengubah satu aturan penting dalam laga kontestasi electoral kedepannya. Lahirnya ketentuan terhadap partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen perempuan akan berkonsekuensi hukum terhadap pencoretan dari dapil tersebut. Untuk pertama kalinya terdapat harga yang harus dibayar. Namun apabila ditelisik lebih mendalam sanksi ini masih beroperasi di tataran permukaan layaknya fenomena gunung es, sementara mesin sesungguhnya berputar lebih dalam. Putusan ini pada akhirnya memaksa partai memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam daftar. Putusan ini tidak menyentuh siapa yang memutuskan dapil mana yang diberikan kepada perempuan itu. Ia tidak masuk ke ruang rapat tertutup tempat nomor urut diputuskan. Ia tidak mengubah fakta bahwa logistik kampanye masih mengalir mengikuti siapa yang punya koneksi, bukan siapa yang punya rekam jejak.

Ruang Politik yang Perlu Disentuh

Narasi yang beredar selama ini sederhana: perempuan tidak mau masuk politik. Laporan Women Research Institute justru menunjukkan sebaliknya. Perempuan sudah maju, tetapi sistem politik Indonesia lebih menghargai modal kampanye daripada modal sosial yang mereka bangun bertahun-tahun. Masalahnya bukan keberanian perempuan untuk maju. Masalahnya

adalah sistem yang tidak pernah sungguh-sungguh dirancang agar mereka menang.

Cara kerja sistemnya sederhana dan brutal sekaligus. Partai menaruh caleg perempuan di dapil yang sudah dikuasai dinasti lokal sejak periode pemilu sebelumnya. Nomor urut kompetitif disimpan hanya untuk mereka yang punya koneksi atau bisa mendanai sendiri. Logistik kampanye mengalir ke kandidat dengan jaringan donatur, bukan kepada mereka yang mengabdikan dan berdedikasi. Dan ketika partai akhirnya menempatkan perempuan di kursi legislatif, perempuan yang dipilih sering kali bukan karena membawa agenda perempuan, melainkan karena menjaga suara keluarga politik yang lebih besar.

Dari 128 anggota DPR perempuan terpilih pada 2024, hampir separuhnya memiliki hubungan kekerabatan dan dinasti politik. Anak perempuan tokoh partai. Istri bupati. Keponakan ketua fraksi. Bukan perempuan dari posyandu. Bukan perempuan yang dua puluh tahun membangun kepercayaan di sebuah daerah kecil. Ketika perempuan akhirnya masuk ke parlemen, yang masuk lebih



Oleh
Andi Muhfi Zandi M, S.IP
*Kepala Subbagian Hukum,
 Humas, Datin Bawaslu
 Kab.Bone*

sering bukanlah mereka yang memiliki dedikasi. Yang masuk adalah perempuan yang mewarisi nama belakang yang benar.

Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Substantif

Di banyak daerah, perempuan yang paling mengenal kebutuhan warganya justru paling jauh dari kursi yang mewakili mereka. Bukan karena tidak bekerja. Karena politik Indonesia lebih menghargai warisan nama daripada warisan pengabdian. Kekuasaan sering bertahan bukan dengan menolak tuntutan, melainkan dengan memberi perubahan secukupnya agar tidak ada alasan untuk memberontak. Kuota 30 persen tanpa sanksi selama dua dekade bekerja persis seperti itu. Cukup untuk membuat Indonesia terlihat demokratis di forum internasional. Tidak cukup untuk memaksa siapapun benar-benar berbagi kekuasaan. Papan permainannya tetap miring. Yang berubah hanya siapa yang diizinkan duduk di meja.

Dalam tulisan Iris Marion Young mengamati bahwa ketidakadilan struktural tidak butuh peran jahat. Ia hanya butuh pihak yang terus melakukan hal yang

masuk akal dalam sistem yang tidak adil. Tidak ada ketua partai yang bangun pagi dengan niat berdasarkan emosional dan subjektivitas. Mereka hanya membuat keputusan yang rasional dalam logika partai sebagai mesin elektoral. Hasilnya tetap sama: separuh anggota DPR perempuan membawa nama keluarga yang sudah lama berkuasa, hingga hari ini kunci ruang kekuasaannya masih dipegang dinasti dan kekuatan yang sama.

Pada akhirnya yang perlu memaksa perubahan ini bukan ketua umum partai, bukan anggota DPR yang dua dekade duduk di kursi itu. Mereka tidak melawan seorang politisi. Mereka melawan sebuah arsitektur. Dan arsitektur itu tidak runtuh hanya karena satu tiangnya berhasil digoyang. Karena demokrasi tidak diuji ketika semua orang boleh mencalonkan diri. Demokrasi justru diuji ketika sistem tidak lagi bisa memastikan hanya orang dan pihak tertentu yang menang. Aturan mainnya baru saja berubah satu langkah dan harapannya dapat memberikan efek domino pada keterwakilan perempuan yang substantif dan berdedikasi untuk bangsa.